

**Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa
Internasional: Studi Kasus Konflik Timur Tengah**

Rifa Aziza Fajriani¹, Silvana Putri Nurhalizah², TB Sultan Mardotillah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
rifaaf.03@gmail.com¹, putrisilvana232@gmail.com²,
sultanmardotillah12@gmail.com³

ABSTRACT

The Middle East conflict is one of the longest and most complex conflicts in modern history, involving multiple countries and causing significant regional instability. This journal aims to analyze the role of the United Nations Security Council (UNSC) in resolving international disputes, with a special focus on conflicts in the Middle East. Using qualitative methods with a case study approach, this research examines various UNSC interventions through secondary data analysis from research reports, journal articles, books and other reliable sources. The research results show that the UNSC has broad powers and authority to resolve conflicts, including issuing resolutions, implementing sanctions, sending peacekeeping troops, and taking military action if necessary. However, the UNSC faces various obstacles such as the use of veto rights by permanent members, conflicting national interests, limited resources, and inconsistent compliance by member countries. In conclusion, although the UNSC plays a crucial role in maintaining international peace and security, its effectiveness in resolving conflicts is highly dependent on the cooperation and commitment of all UN member states.

Keywords: UN Security Council, Middle East conflict, international dispute resolution, UN resolutions, international peace

ABSTRAK

Konflik Timur Tengah merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern, melibatkan berbagai negara dan menyebabkan ketidakstabilan regional yang signifikan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam penyelesaian sengketa internasional, dengan fokus khusus pada konflik di Timur Tengah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji berbagai intervensi DK PBB melalui analisis data sekunder dari laporan penelitian, artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DK PBB memiliki kekuatan dan wewenang yang luas dalam mengatasi konflik, termasuk mengeluarkan resolusi, menerapkan sanksi, mengirim pasukan penjaga perdamaian, dan mengambil tindakan militer jika diperlukan. Meskipun demikian, DK PBB menghadapi berbagai hambatan seperti penggunaan hak veto oleh anggota tetap, kepentingan nasional yang bertentangan, keterbatasan sumber daya, dan kepatuhan negara anggota yang tidak konsisten. Kesimpulannya, meskipun DK PBB memainkan peran krusial dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen seluruh negara anggota PBB.

Kata kunci: Dewan Keamanan PBB, konflik Timur Tengah, penyelesaian sengketa internasional, resolusi PBB, perdamaian internasional

PENDAHULUAN

Pada umumnya, dalam melangsungkan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bekerja sama, berdampingan, dan hidup dengan damai. Namun, kadang terjadi benturan kepentingan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dengan negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain, adakalanya, benturan kepentingan pun tidak dapat dihindari. Akibat dari benturan kepentingan, terkadang, dapat menimbulkan konflik bersenjata atau peperangan. Setiap peperangan selalu menimbulkan kehancuran, baik di pihak yang menang maupun yang kalah. Bahkan banyak perang yang mengakibatkan lenyapnya sebuah bangsa atau negara. Akibat perang yang merusak segala sendi kehidupan, maka, manusia pun memikirkan tentang perdamaian yang kekal dan abadi. Upaya menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas setiap negara untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama (Surwandono, 2013).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang lahir pada 24 Oktober 1945. PBB dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional terluas dan terlengkap, tetapi juga amat kompleks. Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB adalah meliputi semua negara di dunia, baik anggota maupun bukan. Hingga saat ini, sebagai organisasi besar atau organisasi internasional par excellence yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB memiliki pengaruh dan peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, khususnya di bidang perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*) ataupun di bidang ekonomi sosial (Assri, 2021).

Fungsi-fungsi yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa luas dan pelik permasalahan yang ditangani PBB sebagai organisasi internasional. Mengingat fungsi dan wewenangnya (*competence*) yang beraneka ragam itu, maka, PBB tidak dapat dipandang hanya sebagai “subjek hukum internasional” atau “lembaga hukum” (*legal institution*) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu “lembaga politik” (*political institution*) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional. Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian (Habeahan, 2018).

Konflik Timur Tengah telah menjadi salah satu konflik yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 1948 dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Konflik ini telah menyebabkan korban jiwa yang banyak dan telah mengganggu stabilitas regional. Dalam situasi

seperti ini, peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa internasional sangat penting.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan mengkaji peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa internasional, khususnya pada konflik di Timur Tengah, melalui analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur untuk memahami sejarah, dinamika, dan intervensi Dewan Keamanan dalam konflik Timur Tengah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi efektivitas tindakan dan keputusan Dewan Keamanan dalam konteks konflik yang terjadi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai peran dan dampak Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian sengketa di kawasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Dewan Keamanan PBB didirikan pada tahun 1945 sebagai salah satu badan utama PBB. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejak awal, Dewan Keamanan PBB telah berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa internasional melalui cara-cara damai dan mengambil tindakan khusus jika diperlukan (Wibawana, 2023).

Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan dan wewenang yang luas dalam menyelesaikan sengketa internasional (Marasabessy et al., 2023). Berikut adalah beberapa contoh kekuatan dan wewenang Dewan Keamanan PBB:

1. Menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang dapat menyebabkan gesekan internasional.
2. Merekomendasikan metode-metode untuk menyesuaikan perselisihan atau syarat-syarat penyelesaian.
3. Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil.
4. Mengambil tindakan militer terhadap penyerang.
5. Mengesahkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
6. Menjatuhkan sanksi ekonomi dan tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi.

Dewan Keamanan PBB memiliki beberapa fungsi yang penting dalam menyelesaikan sengketa internasional, seperti:

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia.
2. Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai.
3. Meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik.

4. Melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan PBB telah berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Contohnya, dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Dewan Keamanan PBB membantu menyelesaikan persengketaan antara Malaysia dan Filipina melalui cara-cara damai. Dalam penyelesaian sengketa internasional, Dewan Keamanan PBB memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan dan wewenang yang luas untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui cara-cara damai dan mengambil tindakan khusus jika diperlukan.

Studi Kasus: Konflik Timur Tengah

Konflik Timur Tengah telah berlangsung lama dan melibatkan sejumlah negara, termasuk Israel dan Palestina. Salah satu konflik yang paling terkenal adalah Konflik Israel-Palestina, yang dimulai pada tahun 1948 ketika Israel didirikan, menyebabkan Palestina menjadi wilayah yang dikuasai oleh Israel. Konflik ini berkisar pada sengketa wilayah, pendudukan, dan pelanggaran hak asasi manusia (Gustina, 2012).

Selain itu, terdapat juga Perang Teluk 1, yang terjadi antara Irak dan Iran dari tahun 1980 hingga 1988. Perang ini dipicu oleh sengketa wilayah di Sungai Shatt Al Arab dan dampak Revolusi Islam di Iran. Konflik ini berakhir dengan Perjanjian Algier yang mengatur perbatasan wilayah antara Irak dan Iran di Shatt al Arab (Seruni, 2024).

Selanjutnya, Perang Teluk 2 berlangsung dari tahun 1990 hingga 1991 antara Irak dan Kuwait. Konflik ini dimulai dengan serangan Irak terhadap Kuwait yang dipicu oleh masalah utang dan sengketa lainnya. Perang ini berakhir dengan kemenangan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang berhasil membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak.

Dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah, Dewan Keamanan PBB telah mengambil beberapa langkah:

1. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi untuk menyelesaikan konflik, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
2. Dewan Keamanan PBB telah membantu dalam pengembangan pasukan penjaga keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik. Contohnya, pasukan penjaga keamanan PBB telah dikerahkan di Timur Tengah untuk memantau situasi keamanan dan menghentikan konflik.
3. Dewan Keamanan PBB telah mengambil langkah khusus untuk menyelesaikan konflik, seperti menghentikan pendudukan ilegal Palestina dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel (Saputri, 2023).
4. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sanksi terhadap beberapa negara yang terlibat dalam konflik, seperti sanksi terhadap Irak selama Perang Teluk 2.

5. Dewan Keamanan PBB telah mengembangkan program perdamaian untuk menyelesaikan konflik, seperti program perdamaian di Timur Tengah yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut (Mirani, 2013).

Dewan Keamanan PBB telah berperan penting dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah dengan mengambil langkah-langkah yang berbeda-beda, termasuk penggunaan resolusi, pengembangan pasukan penjaga keamanan, pengambilan langkah khusus, penggunaan sanksi, dan pengembangan program perdamaian.

Kekuatan dan Kemampuan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa kekuatan diplomatik dan politik yang dimiliki Dewan Keamanan PBB antara lain:

1. Resolusi Dewan Keamanan: Dewan Keamanan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat bagi semua negara anggota PBB. Resolusi ini sering digunakan untuk mengatur tindakan internasional terkait konflik, termasuk penerapan sanksi, embargo senjata, atau bahkan intervensi militer.
2. Mediasi dan Negosiasi: Dewan Keamanan dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional. Anggota Dewan dapat mengirim utusan khusus atau misi diplomatik untuk memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Misi Perdamaian PBB: Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah-daerah konflik. Misi ini bertujuan untuk menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan penyelesaian damai.
4. Pengaruh Anggota Tetap: Lima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis) memiliki pengaruh politik yang besar. Kekuatan veto mereka dapat memengaruhi keputusan yang diambil, serta kemampuan diplomatik mereka dalam mendorong penyelesaian sengketa.

Selain kekuatan diplomatik dan politik, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kekuatan hukum dan yurisdiksi yang signifikan dalam penyelesaian sengketa internasional. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Berdasarkan Pasal 39 dan 41 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menentukan apakah suatu situasi merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman tersebut.
2. Dewan Keamanan dapat memberlakukan sanksi ekonomi, perdagangan, atau diplomatik terhadap negara yang dianggap melanggar ketentuan internasional atau menimbulkan ancaman terhadap perdamaian. Contoh

sanksi termasuk pembekuan aset, pembatasan perjalanan, dan embargo senjata.

3. Berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB, jika tindakan nonmiliter dianggap tidak memadai, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk memerintahkan intervensi militer untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
4. Dewan Keamanan dapat merujuk kasus-kasus tertentu ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan pendapat atau putusan hukum. Ini termasuk situasi yang melibatkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.
5. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan resolusi yang telah diadopsi. Ini termasuk pembentukan komite atau kelompok kerja untuk memantau dan melaporkan kepatuhan negara-negara terhadap sanksi dan tindakan yang diberlakukan.

Melalui kombinasi kekuatan diplomatik, politik, hukum, dan yurisdiksi ini, Dewan Keamanan PBB memainkan peran yang krusial dalam upaya penyelesaian sengketa internasional dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Hambatan dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Meskipun Dewan Keamanan PBB memiliki berbagai kekuatan dan kemampuan, mereka juga menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan dalam penyelesaian sengketa internasional:

1. Hak Veto: Lima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto yang dapat digunakan untuk memblokir resolusi yang diusulkan, bahkan jika resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota lainnya. Penggunaan hak veto sering kali mencerminkan kepentingan nasional anggota tetap, sehingga menghambat tindakan kolektif.
2. Kepentingan Nasional yang Bertentangan: Negara-negara anggota Dewan Keamanan sering memiliki kepentingan nasional yang bertentangan dalam konflik tertentu, yang dapat menghalangi upaya untuk mencapai konsensus tentang tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.
3. Kurangnya Sumber Daya: Dewan Keamanan sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung misi perdamaian dan operasional lainnya. Keterbatasan finansial dan logistik dapat memengaruhi efektivitas intervensi.
4. Kepatuhan Negara Anggota: Tidak semua negara anggota mematuhi resolusi Dewan Keamanan. Kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dan keengganan beberapa negara untuk bekerja sama dapat mengurangi efektivitas resolusi yang diadopsi.
5. Konflik Internal di Negara-negara Konflik: Situasi di lapangan sering kali sangat kompleks, dengan berbagai kelompok bersenjata, kepentingan politik yang beragam, dan dinamika sosial yang rumit. Hal ini membuat sulit bagi

Dewan Keamanan untuk merumuskan dan menerapkan strategi penyelesaian yang efektif.

Negara-negara anggota PBB memiliki peran penting dalam mendukung upaya penyelesaian sengketa internasional, baik melalui tindakan kolektif di bawah payung PBB maupun melalui upaya individual. Beberapa peran utama negara anggota meliputi:

1. Negara-negara anggota dapat mendukung resolusi Dewan Keamanan melalui implementasi kebijakan dan tindakan yang sesuai di tingkat nasional. Ini termasuk pemberlakuan sanksi, partisipasi dalam misi perdamaian, dan dukungan diplomatik untuk upaya mediasi.
2. Banyak negara anggota berkontribusi pada misi perdamaian PBB dengan menyediakan personel militer dan sipil, serta sumber daya logistik. Partisipasi ini sangat penting untuk keberhasilan misi-misi tersebut.
3. Negara anggota dapat menggunakan hubungan bilateral dan regional mereka untuk mendorong dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Peran mediator yang dimainkan oleh negara-negara tertentu sering kali membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi penyelesaian damai.
4. Melalui kerja sama dalam berbagai forum internasional dan regional, negara anggota dapat memperkuat upaya kolektif untuk menyelesaikan sengketa dan mencegah konflik. Ini termasuk kerjasama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan pembangunan.
5. Negara-negara anggota memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum internasional dan mendukung implementasi putusan-putusan Mahkamah Internasional serta lembaga hukum lainnya. Kepatuhan terhadap hukum internasional merupakan dasar penting untuk penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

Dengan peran yang beragam ini, negara-negara anggota PBB dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya penyelesaian sengketa internasional, meskipun tantangan dan hambatan yang dihadapi Dewan Keamanan sering kali memerlukan kerja sama dan komitmen yang lebih kuat dari seluruh komunitas internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memiliki peran yang sangat vital dalam upaya penyelesaian sengketa internasional, terutama dalam konflik kompleks dan berkepanjangan seperti di Timur Tengah. Melalui mandat yang diberikan oleh Piagam PBB, DK PBB dapat mengambil berbagai tindakan, termasuk investigasi, rekomendasi, penerapan sanksi, dan bahkan intervensi militer jika diperlukan, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Studi kasus konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa meskipun DK PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi, mengembangkan pasukan penjaga perdamaian, dan mengambil langkah-langkah khusus untuk mengatasi konflik, tantangan tetap ada. Tantangan tersebut meliputi penggunaan hak veto oleh anggota tetap, kepentingan nasional

yang bertentangan, keterbatasan sumber daya, kepatuhan negara anggota, serta kompleksitas konflik internal di negara-negara yang terlibat.

Meskipun demikian, peran DK PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional tetap krusial, dengan negara-negara anggota PBB diharapkan memberikan dukungan penuh melalui implementasi resolusi, partisipasi dalam misi perdamaian, dan kerja sama internasional. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini melalui komitmen kolektif dan kerja sama yang lebih kuat, DK PBB dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assri, B. C. A. (2021). Konflik Minoritas di Timur Tengah Konflik Minoritas di Timur Tengah: Studi Kasus Konflik Etnis Konflik Etnis Kurdi. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 1(1), 1–29.
- Gustina, S. (2012). Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1868 Tahun 2009).
- Habeahan, R. E. (2018). Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Vietnam Utara–Vietnam Selatan).
- Marasabessy, M., Hanafi, I. H., & Waltimeana, J. A. Y. (2023). Fungsi Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional. *ATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(6), 544–554.
- Mirani, T. (2013). Penerapan Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Upaya Menciptakan Peace-Building Dunia Internasional dengan Cara Kekuatan (Use of Force) di Kawasan Timur Tengah. *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, 1(2).
- Saputri, D. S. (2023). Indonesia Desak PBB Ambil Tindakan Cepat Turunkan Ketegangan di Timur Tengah. *Republika*.
- Seruni, L. S. (2024). Perang Teluk 1, 2, 3: Latar Belakang dan Jalannya Perang. *Ruang Guru*.
- Surwandono. (2013). Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam Dengan Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 56–64.
- Wibawana, W. A. (2023). Tentang Dewan Keamanan PBB: Tugas, Fungsi, dan Anggotanya. *DetikNews*.